

ABSTRAK

Ari Ardiawan Arifn : *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung*

Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah menjadikan masyarakat sekitar memberikan cap (stigma) jahat kepada dirinya. Karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama dengan masyarakat dan tidak mengalami kemiskinan dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa pidananya. Hal inilah yang disebut sebagai asimilasi atau pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan tujuan pemidanaan yang seperti inilah maka negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya mengakomodasi upaya pembauran narapidana ke dalam lingkungan masyarakat ini. Namun pada kenyataannya, tidak semua narapidana mendapatkan asimilasi atau bahkan banyak sekali narapidana yang tidak mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya.

Berdasarkan alasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam tahap asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung? *kedua*, apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung? *ketiga*, bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung?

Penelitian tentang asimilasi ini bertolak pada Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan *yuridis empiris*. Dengan pendekatan ini nantinya akan dapat dideskripsikan tentang pelaksanaan program asimilasi narapidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diatas.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan yaitu: *pertama* pelaksanaan asimilasi di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung umumnya berbentuk asimilasi kerja dengan pihak ketiga, *kedua*, banyaknya kendala-kendala yang dihadapi, sehingga menghambat kelancaran program asimilasi, *ketiga*, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung dalam pelancaran program asimilasi sudah cukup baik meskipun keluwesan dalam pelaksanaannya terkekang pada kerangka hukum yang ada, hanya saja hasil dari upaya ini masih belum terlihat secara faktual.